

## Analisis Retribusi dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah

Dadang Sudirno<sup>1)</sup>, Hani Sri Mulyani<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka

\*Email korespondensi: [dsudirno@unma.ac.id](mailto:dsudirno@unma.ac.id)

### Abstract

*Independence of Regional Development in regional autonomy is the ability of local governments to self-finance government activities, development, services to the community and manage regional finances, especially Regional Original Income (PAD) and Economic Growth Levels without relying mostly on assistance from the central government. This study aims to determine the effect of local taxes, levies and the level of economic growth on the independence of regional development in CIAYUMAJAKUNING regencies / cities for the 2011-2018 period, either partially or simultaneously. The variables used in this study are Local Taxes, Retribution, Economic Growth Rate and Regional Development Independent Ratio obtained from the website of the Directorate General of Financial Balance (DJPK) and the website of the Regency / City Central Statistics Agency (BPS) in West Java. The analytical method used is descriptive analysis method and verification. The sample selection in this study used the saturated sample method, and the samples from this study were 5 districts / cities, namely Cirebon City, Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency and Kuningan Regency in the 2011-2018 period so that 40 sample data were obtained. The analytical tool used in this research is simple linear regression analysis. The results of this study indicate that Retribution has a significant effect on the Independence of Regional Development..*

**Keywords:** Local Taxes, Levies, Economic Growth Rate. Regional Development Independence

**Saran sitasi:** Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2021). Analisis Retribusi dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 516-521.  
doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1511>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1511>

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah diartikan sebagai “pembangunan di daerah” dengan inisiatif, arahan, perencanaan dan dana pemerintah pusat (Kuncoro, 2014 : 37). Kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah maupun masyarakat baik itu dari segi pembangunan, ekonomi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu disebut dengan otonomi daerah (Marizka : 2013). Masalah yang paling penting dalam kerangka otonomi daerah yaitu menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut (Ariani : 2016) Berlakunya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kemandirian daerah. Menurut Halim (2018), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan. Kemandirian Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Negara yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor yang mempengaruhi Kemandirian daerah yaitu Belanja Daerah,

Penerimaan Daerah, Dan pengaruhnya Bagi Hasil, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini akan menganalisis Retribusi dan pengaruhnya terhadap kemandirian pembangunan daerah. Dilakukannya penelitian diharapkan lebih memberikan daya penjas karena penelitian-penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang berbeda.

Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Mardiasmo, 2017:18). Fluktuasi penerimaan retribusi daerah akan berpengaruh terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), apabila dana Retribusi yang masuk ke kas daerah mampu memberikan kontribusi terhadap daerah untuk pembangunan daerah sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dari Pendapatan Asli Darah (PAD) dan mendominasi pembiayaan daerah dibandingkan dana pemerintah pusat, sehingga daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri artinya tinggi rendahnya Retribusi dapat memengaruhi Kemandirian Pembangunan Daerah.

Selain fenomena diatas, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya gap reseach Hasil peneltian terdahulu untuk variabel retribusi, Hasil penelitian Fadly Nggilu (2016), Retribusi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian daerah, Sedangkan, menurut Manasep Orocomna (2015), Retribusi tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dan utuk variabel pertumbuhan ekonomi hasil penelitian Renny Nur'ainy (2013) menunjukkan hasil bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Sedangkan hasil penelitian Manasep Orocomna (2015) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian Pajak Daerah.

Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah . Seperti destinasi wisata, bandara, hotel, restoran dan sebagainya. Tidak hanya di daerah perkotaan, bahkan di wilayah Kabupaten/Kota CIAYUMAJAKUNING juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seperti saat ini Majalengka yang sedang berkembang dan mengalami pembangunan di sekitarnya, baik itu destinasi wisata, hotel, restoran, maupun bandara Internasional yang saat ini tekah resmi dibuka, menurut Fajar Sidik (2014) kehadiran mega proyek Bandara Internasional Jabar (BIJB) di Kertajati, Majalengka, diyakini

menjadi magnet yang akan menarik investasi baru dalam jumlah besar. Melihat hal tersebut tentunya akan menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur.

Menurut Ilmi Yanfaunnas (2017) Kota Cirebon dengan infrastruktur kota yang sudah dapat dikatakan baik dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut terutama yang bersumber dari Pajak Daerah, Selain itu Kabupaten Indramayu juga saat ini sedang mengalami perkembangan di bidang pariwisata pantai dan Infrastuktur kota yang semakin baik, bahkan Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan salah satunya gunung ciremai yang menjadi destinasi wisata. Hal ini yang menjadi potensi sumber penerimaan PAD, baik individu maupun maupun secara keseluruhan daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Retribusi Dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemandirian pembangunan daerah Kabupaten/Kota CIAYUMAJAKUNING baik secara parsial maupun simultan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemandirian pembangunan daerah Kabupaten/Kota CIAYUMAJAKUNING baik secara parsial maupun simultan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Analisis deskriptif dan Analisis verifikatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (CIAYUMAJAKUNING). Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingg diperoleh Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4 Kabupaten dan 1 Kota dengan periode penelitian selama 8 tahun. Sehingga total data sampel dalam penelitian ini yaitu 40 data sampel.

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi yang diperoleh melalui situs resminya ([www.djpk.keu.go.id](http://www.djpk.keu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik yang mempublikasi data Produk Regional Bruto melalui situs resminya ([www.jabar.go.id](http://www.jabar.go.id)).

Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi linier sederhana dan uji hipotesis dengan kaidah pengujian sebagai berikut:

**Kaidah pengujian hipotesis secara parsial**

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  :  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  :  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

**Kaidah pengujian hipotesis secara simultan**

Menggunakan uji statistik F adalah jika  $p\text{ value} < 0,05$  atau  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima. Sebaliknya, jika  $p\text{ value} \geq 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil penelitian**

**Tabel 1**

**Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Stand Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1675.031	244.356		6.855	.000
Retribusi	-1.739	1.677	-.166	-1.037	.306

a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 hasil diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1675,031 - 1,739X$$

Rumus persamaan regresi berganda diatas dapat dilihat bahwa nilai Y merupakan Kemandirian Pembangunan Daerah, X merupakan Retribusi, persamaan tersebut Menunjukkan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 1675,031 bernilai positif. Artinya jika variabel Retribusi bernilai 0 (nol), maka Kemandirian Pembangunan Daerah akan bernilai sesuai dengan nilai konstanta dalam persamaan yaitu sebesar 1675,031.
- b. Nilai koefisien regresi Retribusi sebesar 1,739 bertanda negatif artinya bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel Retribusi

maka akan menurunkan Kemandirian Pembangunan Daerah sebesar 1,739 satuan. Sebaliknya setiap pengurangan 1 satuan pada variabel Retribusi akan meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah sebesar 1,739 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai t hitung pada variabel Retribusi adalah sebesar 1,037 bernilai Negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, nilai t hitung  $> t_{tabel}$  yaitu  $1,037 > 2,02619$  dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,050$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya retribusi berpengaruh terhadap kemandirian pembangunan daerah.

**3.2. Pembahasan**

Retribusi berpengaruh terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadly Nggilu (2016) yang menyatakan bahwa Retribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rizka Lutfita Novalistia (2016) dan Manasep orocomna (2017) yang menyatakan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah.

Secara teoritis retribusi daerah juga merupakan sumber PAD yang digali atau yang diperoleh dari masing-masing daerah, sehingga dapat diketahui kemampuan keuangan sebenarnya dari suatu daerah. Retribusi merupakan sumber PAD yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan kab/kota dalam membiayai pembangunan daerahnya. Hasil pungutan retribusi dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum, namun bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang telah membayar retribusi dan menggunakan fasilitas dari pemerintah. Sebagai contoh yaitu telah menggunakan fasilitas rumah sakit, bandara, sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Sehingga tinggi rendahnya Retribusi daerah akan mempengaruhi tinggi rendahnya kemandirian pembangunan daerah.

Penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa Retribusi berpengaruh terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah namun dengan arah yang negatif, artinya semakin tinggi retribusi daerah maka semakin rendah kemandirian pembangunan daerah, hal ini disebabkan karena usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah

dalam menggali potensi Retribusi kurang efektif, sehingga tingginya retribusi sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah justru menurunkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Ketidak mampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya secara maksimal menyebabkan pemerintah daerah masih mengandalkan Alokasi dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Efektifitas suatu daerah dalam menggali sumber keuangan, akan sangat tergantung pada kebijakan atau peraturan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan sisi lain kurang efektifnya pemerintah dalam mengembangkan potensi retribusi sebagai akibat dari faktor penanganan Retribusi yang ada di Kabupaten/Kota CIAYUMAJAKUNING, seperti pengendalian sistem internal pemerintah daerah masih belum berjalan dengan baik, sehingga tingginya biaya yang dikeluarkan berbanding terbalik dengan retribusi yang diperoleh. Selain itu hal yang menyebabkan retribusi menyebabkan pengaruh negative terhadap kemandirian adalah banyaknya permasalahan retribusi yang sering terjadi di daerah-daerah, seperti permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum atau di pasar-pasar tradisional yang sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan pribadi sehingga upaya pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana tidak berkontribusi terhadap peningkatan retribusi daerah.

Aturan Pemda yang seharusnya dijalankan menjadi tidak berguna, karena mereka para pemungut retribusi yang seharusnya menyetorkan hasil retribusi ke daerah malah digunakan secara pribadi. Sehingga hasil retribusi yang diperoleh tidak sesuai dengan anggaran, dan perolehan PAD menjadi rendah.

#### **4. KESIMPULAN**

Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah namun dengan arah yang negatif, hal ini disebabkan karena kurangnya usaha dari pemerintah dalam menggali potensi retribusi, serta pengendalian sistem internal pemerintah daerah masih belum berjalan dengan baik terkait regulasi dan pemungutan retribusi, selain itu dibutuhkan fasilitas penunjang, sarana dan prasarana yang memadai untuk retribusi, sehingga besaran biaya

yang dikeluarkan untuk menunjang sarana retribusi tidak berkontribusi positif terhadap pendapatan retribusi.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Untuk menciptakan Kab/Kota yang mandiri Pemerintah Daerah Kab/Kota CIAYUMAJAKUNING sebaiknya dapat mengoptimalkan PAD, selain itu pemerintah daerah kab/kota sebaiknya melakukan penataan kelembagaan yang baik, memperbaiki sistem pengendalian internal, penyempurnaan dasar hukum dan regulasi penyesuaian tarif pemungutan sehingga dapat menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor, memberikan kemudahan bagi investor dan dapat meningkatkan PAD .

#### **6. REFERENSI**

- Abdul Halim dan Kusufi, Muhammad Syam. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Aditya Ramadhan Sriparno dan Maria M. Ratna Sari. 2015. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi.Vol.13.No.2, ISSN: 2302-8556. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2017. <https://www.bps.go.id/publication/2018/10/05/89552064fb46e82d2b50468f/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2013-2017.html> (di akses pada tanggal 27 September 2018)
- Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012-2016. <https://www.bps.go.id/publication/2017/09/27/1706a7f7a912d10a8c3ddca6/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2012-2016.html> (di akses pada tanggal 27 September 2018)
- Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011-2015. <https://www.bps.go.id/publication/2016/11/11/480be954c98100db49d15f8b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2011-2015.html> (di akses pada tanggal 27 September 2018)

- Dadang Sudirno dan L.Suparto. 2017. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Teori dan Aplikasi. Fakultas Ekonomi Universitas Majalengka. Majalengka.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. APBD, Realisasi APBD, dan Neraca. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> (di akses pada tanggal 27 September 2018)
- Endang Mulyani. 2017. Ekonomi Pembangunan. UNY Press. Yogyakarta.
- Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 04. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Fajar Sidik. 2014. Majalengka Siap Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru Di Jabar Timur. <http://bandung.bisnis.com/read/20140622/82446/511333/bupati-majalengka-siap-menjadi-pusat-pertumbuhan-baru-di-jabar-timur> (di akses pada tanggal 26 November 2018).
- Faried Ali dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama. Bandung.
- Imam Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. BPFE Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ilmi Yanfaunnas. 2017. 11 Pendapatan Asli Daerah BPPD Kabupaten Cirebon Lampau Target. <http://www.radarcirebon.com/11-pendapatan-asli-daerah-bppd-kabupaten-cirebon-lampau-target.html> (di akses pada tanggal 20 Oktober 2018).
- Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Syariah Paper Accounting. ISSN 2460-0784. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Manasep Orocomna, B. Elita Bharanti dan Paulus K. Allo Layuk. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Vol. 2 No. 3, ISSN 2477-7838.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi. Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muradjad Kuncoro. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Nogi S. Tangkilisan, Hassel. 2007. Manajemen Publik. PT Grasindo. Jakarta.
- Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno. 2017. Ekonomi Pembangunan. CV SAH MEDIA. Makasar.
- Renny Nur'ainy, Desfitriana dan Rooswhan Budi Utomo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Vol. 5, ISSN: 1858-2559.
- Reza Marizka. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2006-2011. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Rizka Lutfita Novalistia. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi. Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Rudy Badrudin. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metodologi Penelitian Kombinasi. Alfabeta. Bandung.
- Sunarto dan Y Sunyoto. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi. ISSN: 0853-5205. STIE Dharmaputra Semarang.
- Uhar Suharsaputra. 2014. Metode Penelitian. Refika Aditama. Bandung.
- Uma Sekaran. 2014. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1083 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 Tentang Pemungutan Retribusi Tidak Diborongkan Sama Seperti Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 Tentang Pajak Daerah Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.